ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN

PSBR BUDI SATRIA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TERHADAP PENERIMA MANFAAT PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DI MASA PANDEMI COVID 19

**Junaidi1, Anwary2, Dhewi3**

*Program studi kesehatan masyarakat Fakultas kesehatan masyarakat*

*Banjarmasin Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari*

**ABSTRAK**

Pelayanan Kesehatan adalah sarana penunjang yang penting dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial di panti Sosial. Terlebih di saat kondisi Pandemi covid 19. Kebijakan Kesehatan yang tepat dan terukur tentulah diperlukan agar kegiatan rehabilitasi sosial dapat terus dilaksanakan tanpa hambatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan kesehatan di panti sosial bina remaja Budi Satria provinsi kalimantan Selatan dimasa pandemi covid 19 tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh kegiatan pelayanan terhadap klien panti tetap dapat dilakukan secara langsung dimasa pandemi dengan penambahan program protokol kesehatan dan pengefektifan Sumber daya manusia di panti. Sebuah kebijakan dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh beberapa faktor ,Yaitu : Kepemimpinan , dukungan organisasi dan sinergi yang kuat antara pemimpin dan para pelaksana dilapangan. Kebijakan yang bersifat dinamis ini hanyalah sebuah alternatif kebijakan dimasa tertentu dan hanya cocok dilaksanakan bagi para pelaksana yang mempunyai motivasi tinggi dibawah pemimpin dengan karakter yang kuat.

Kata Kunci : kebijakan kesehatan, rehabilitasi sosial, kebijakan kesehatan.

ABSTRACT

HEALTH POLICY ANALYSIS IN PANTI SOSIAL BINA REMAJA BUDI SATRIA TO BENEFIT RECIPIENTS OF PROGRAM SOCIAL REHABILITATION AT COVID 19 PANDEMIC

IN 2021

**Junaidi1, Anwary2, Dhewi3**

*Public Health Program in Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad al Banjari Banjarmasin*

Health Services are an important supporting facility in the implementation of social program rehabilitation in panti sosial. Especially during covid 19 pandemic condition, Appropriate and measurable health policies are certainly needed so that social rehabilitation activities can continue to be carried out without obstacles. The purpose of this study was to find out the health policy in Panti sosial Bina Remaja Budi satria durinng covid pandemic in 2021. The results showed that all service activities for the clients in panti could still be carried out directly during the pandemic with the addition of health protocols and effectiveness human resorces in panti. A policy can run well if it is supported by several factors, namely: Leadership, organizational support and strong synergy between leaders and implementers in the field. This dynamic policy is only an alternative policy at certain times and is only suitable for implementers who have high motivation under leaders with strong characters.

Keywords : social rehabilitation, health policy, leadership

**PENDAHULUAN**

 PSBR Budi Satria Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas memberikan pembinaan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar bermasalah sosial, termasuk didalamnya remaja putus sekolah yang merupakan penerima manfaat program rehabilitasi sosial yang meliputi pembinaan fisik, mental sosial, bakat dan kemampuan serta keterampilan kerja agar penerima manfaat mampu mandiri maupun berkelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Tahun 2020 awal disaat dunia ditetapkan dalam keadaan Pandemi Covid 19 hampir seluruh dinas dan instansi mengubah sistem kerja serta pembatasan pelayanan serta pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat pula. Pelayanan publik sangat dibatasi, akses masuk ke kantor pemerintahan sangat terbatas, apalagi jika ada yang telah dianggap positif covid 19 (swab antigen) maka kebanyakan tempat akan menjadi sepi dengan alasan sterilisasi tempat. Ketakutan psikologis nampak merata di tempat tempat yang mempunyai akses dengan teknologi.

Kecemasan pun juga turut terbawa ke panti milik pemerintah daerah, hampir semua panti langsung mengikuti prosedur *work from home* (bekerja dari rumah) untuk mengurangi kepadatan petugas, banyak panti yang memulangkan sementara klien penerima manfaat, jelas sekali ketakutan psikologis saat itu terjadi dikarenakan situasi yang memang belum jelas, ditambah berita berita tentang peningkatan jumlah penderita covid 19 yang sangat cepat dan meninggalnya pasien covid 19 maka semakin mempengaruhi kondisi psikologis pelayanan di panti panti. . Tanpa adanya sebuah kebijakan Kesehatan khusus, sulit rasanya kegiatan rehabilitasi sosial tetap berlangsung seakan tanpa kendala. Hal ini menurut peneliti adalah sebuah fenomena yang menjadi dasar untuk melakukan penelitian tentang kebijakan kesehatan pada PSBR Budi Satria di saat masa pandemi, yaitu kebijakan– kebijakan yang berhubungan dengan Kesehatan dan hal-hal yang terkait dengan kebijakan tersebut yang membuat lembaga PSBR Budi Satria tetap dapat melaksanakan fungsinya dalam memberikan pelayanan Rehabilitasi Sosial kepada para penerima manfaat program yaitu klien dari kategori anak terlantar putus sekolah di usia anak remaja. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan kesehatan di PSBR Budi Satria di masa pandemi covid 19.

Kebijakan (*policy*) adalah sejumlah keputusan yang di buat oleh mereka yang bertanggung jawab dalam bidang kebijakan tertentu. Kebijakan Kesehatan adalah (*Health Policy*) adalah Kebijakan yang dapat mempengaruhi faktor – faktor penentu di sektor kesehatan agar dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan bagi seorang dokter, kebijakan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan layanan kesehatan (Walt, 1994).

Implementasi sebagai suatu konsep tindak lanjut pelaksanaan kegiatan cukup menarik untuk dikaji oleh cabang cabang ilmu. Hal ini semakin mendorong perkembangan konsep implementasi itu sendiri, disamping itu juga menyadari bahwa dalam mempelajari implementasi sebagai suatu konsep akan dapat memberikan kemajuan dalam upaya-upaya pencapaian tujuan yang telah diputuskan.

Grindle dalam Sutirin (2006) menyatakan bahwa implementasi kebijakan sebagai keputusan politik dari para pembuat kebijakan yang tidak lepas dari pengaruh lingkungan Grindle mengungkapkan pada dasarnya implementasi kebijakan publik ditentukan oleh dua variabel yaitu veriabel konten dan variabel konteks.. Isi kebijakan mencakup: (a)Kepentingan yang mempengaruhi, (b)Manfaat yang akan dihasilkan, (c)Derajat perubahan yang diinginkan, (d)Kedudukan pembuat kebijakan, (e)Siapa pelaksana program dan (f)Sumber daya yang dikerahkan. Konteks kebijakan mencakup (a)Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat (b)Karakteristik lembaga penguasa (c)Kepatuhan dan daya tanggap

**METODE**

Penelitian yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif dengan menggunakan cara pendekatan wawancara langsung dan mendalam terutama dengan para pengambil kebijakan Kesehatan di PSBR Budi satria yaitu Kepala Panti, Kepala seksi yang terkait dan Petugas kesehatan serta perwakilan penerima manfaat program rehabilitasi sosial angkatan 81tahun 2021.

Pada penelitian ini peneliti ingin menganalisis terkait kebijakan kesehatan dan implementasinya di PSBR Budi Satria sehingga kegiatan Rehabilitasi sosial tetap berlangsung di masa pandemic. Hasil penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Gambaran Umum Panti Sosial Bina Remaja Budi Satria Provinsi KalSel.**

Panti Sosial Bina Remaja Budi Satria merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan yang pada awalnya disebut Panti Penyantunan Anak (PPA) “Budi Satria” dibangun pada Tahun 1979 dan mulai operasional pada tahun 1981 / 1982, sesuai dengan SK Mensos RI No. 41/HUK/KEP/II/1979, kemudian berubah nama menjadi Panti Sosial Bina Remaja Budi Satria sesuai dengan SK Menteri Sosial RI No. 22 Tahun 1995 merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kanwil Depsos Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah terbentuk Kabinet Persatuan pada bulan Oktober 1999, Depsos Dilikuidasi dan Panti Sosial Bina Remaja Budi Satria diserahkan kepada Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang secara resmi dikukuhkan dengan SK Gubernur Kalsel No. 075 Tahun 2001 tanggal 29 Maret 2001 merupakan Unit Pelaksana Tugas Daerah Dinas Kesejahteraan Sosial pada saat itu. Kemudian diperkuat dengan Perda Prov. Kalsel No. 5 Tahun 2000 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kalimantan Selatan.

 Kebijakan kesehatan PSBR Budi Satria terhadap penerima manfaat program rehabilitasi sosial di masa pandemi covid 19 merupakan kebijakan yang fleksibel dan unik sebagai sebuah keputusan politis agar program rehabilitasi sosial tetap berjalan di masa pandemi covid 19, sebagaimana grindle dalam sutirin (2006) menyatakan bahwa implementasi kebijakan sebagai keputusan politik dari para pembuat kebijakan yang tidak lepas dari pengaruh lingkungan, Sebagai mana Jawaban Informan Inti disaat menjawab pertanyaan peneliti yaitu” *kita berkeyakinan bahwa di hukum Islam itu kata Allah kun fayakun, di samping kita do’a meminta dan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan yang pertama dimasa covid ini ada wabah ini ke mana-mana ada kita dari kebersihannya, lingkungannya, kemudian kita sendiri cuci tangan sebelum makan pakai sabun dengan air yang mengalir, wajib menggunakan masker, wajib menjaga jarak, kenapa kita takut, selama kita melaksanakan itu insya Allah kita akan tidak terjadi dan alhamdulillah terbukti sampai sekarang. Dan justru kalau kita pasrah dengan keadaan, itu Menurut saya itu tidak pantas jadi kita harus terus berbuat kita lawan covid ini. Sebenarnya setahu saya orang-orang yang awam, covid ini dari dulu memang ada wabahnya tapi tidak di besar-besarkan seperti sekarang ya itulah akhirnya anak-anak, orang tua, orang manapun stress apalagi dengan ada berita-berita yang berbeda-beda oleh karena itulah saya mengambil sikap lakukan yang terbaik, jaga aturan protokol kesehatan. Insya Allah aman.” ( baris 11-25, Transkrip 5, Informan Inti ), tampak sekali bahwa kebijakan yang dibuat berbasis believe sistem/ sistem keyakinan personal. Kebijakan kesehatan yang diambil juga merupakan bentuk Lobi ke pejabat atas sebagaimana dikatakan oleh informan inti “ada…. kita harus benar-benar santun terhadap pimpinan…. kita Berikan penjelasan bahwa generasi muda di Kalimantan Selatan yang putus sekolah yang tidak mampu cukup banyak. Kemudian bagaiman bangsa ini akan lebih baik kedapan kalau kita tidak melakukan pembinaan tidak melakukan rehab terhadap mereka… sebenarnya mereka minta perhatian rata-rata minta perhatian, minta di bimbing, minta dibina , karena mereka kurang disitu…terlebih lagi perekonomian, ekonominya… ekonomi dari warga kita itu emang lemah… nah dengan masuk PSBR Insya Allah mereka akan kita berikan keterampilan, kita beri pendidikan, akhlak dan lain sebagainya ,pulang dari psbr mereka akan menjadi pemimpin di daerahnya… buktikan saja…*(transkrip 5, baris 46-56)

Grindle mengungkapkan pada dasarnya implementasi kebijakan publik ditentukan oleh dua variable yaitu variable konten dan variable konteks. Dan konteks Kebijakan Kesehatan Panti Sosial Bina Remaja Budi Satria Provinsi Kalimantan selatan adalah dalam rangka tetap menjalankan program pelayanan Rehabilitasi Sosial secara langsung dalam situasi pandemi covid 19, sehingga Kepala Panti mesti melakukan lobi ke pimpinannya secara langsung yaitu SekdaProv Kalimantan Selatan dengan pendekatan khusus setelah mendapat izin dari Kepala dinas Sosial .

**Standar dan Sasaran serta Tujuan Kebijakan**

 Standar dan sasaran kebijakan sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan PSBR Budi Satria terhadap penerima manfaat program rehabilitasi sosial di masa pandemi covid 19. Implementasi akan menjadi efektif apabila ukuran dan tujuan dari kebijakan memang sesuai dengan sosio-kultur yang ada. Sosio-Kultur di Kalimantan Selatan yang mayoritas Muslim tampaknya menjadi standar kebijakan berbasis kepercayaan, hal ini dapat dilihat dari pendapat informan inti, “ *Keyakinan… kalo tidak punya keyakinan euy apa kita hidup ini … dan kita memang harus yakin kalo tidak yakin jangan di kerjakan. Dalam hukum islam pun berbicara jangan engkau berburuk sangka… wabah ini ada, ada hikmahnya… kita aja yang gak tahu coba kita telusuri kita pelajari kita baca. Itu…. ”*(transkrip 5 baris 39-43). Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil di tentukan oleh berbagai pihak terutama oleh pembuat keputusan dan para pelaksana . oleh karena itu, setiap pelaksana harus memahami standar dan tujuan kebijakan.

* 1. Standar kebijakan

Standar kebijakan sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan Panti Sosial Bina Remaja Budi Satria provinsi Kalimantan selatan, khususnya Kebijakan kesehatan terhadap penerima manfaat program rehabilitasi sosial angkatan 81 di masa pandemi covid 19. Pemahaman tentang maksud dan tujuan dari suatu kebijakan sangat penting agar implementasi kebijakan berhasil dengan baik. Implementasi akan kurang maksimal bahkan bisa gagal jika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Akan tetapi di masa pandemi covid 19 standar dan tujuan kebijakan tampak terlalu kompleks dikarenakan kondisi yang tiba-tiba dan belum terlalu jelas sebagaimana dijelaskan oleh grindle yaitu adanya variable konteks yaitu kondisi pandemi covid 19. Implementasi dapat berjalan jika sesuai dengan tujuan dan di pahami oleh semua pelaksana dalam penerapan kegiatan rehabilitasi sosial walaupun dalam masa pandemi covid 19.

* 1. Sasaran Kebijakan Kesehatan Panti Sosial Bina Remaja Budi Satria Di masa pandemi Covid 19

Sasaran kebijakan adalah para penerima manfaat program atau klien anak terlantar putus sekolah berusia antara 15-20 tahun dari 13 kabupaten/kota sekalimantan selatan. Kebijakan yang diberikan adalah demi tetap berlangsungnya kegiatan rehabilitasi sosial kepada para penerima manfaat sekalipun dalam masa pandemi covid 19.

 Dari dua informan yang peneliti wawancara sebagai sample yaitu saudara Syahdan dan Fatmah sebagai sample yang menjadi sasaran dari kebijakan kesehatan Panti Sosial Bina Remaja Budi Satria, mereka tampaknya tidak mengalami kendala yang berarti dalam proses implementasi kebijakan kesehatan. Misalnya di saat peneliti menanyakan tentang pendapat penerima manfaat terhadap kebijakan kesehatan di masa pandemi covid 19, informan menjawab “*Nyaman yang saya rasakan, dalam menjaga diri sendiri memakai masker, memakai face shield, Cuci tangan* ( transkrip 1 baris 9, informan 1 ), *Protokol Kesehatan Ketika lagi batuk* (baris 14, informan 1). Begitu pula pada informan lainnya menyatakan” *yang saya rasakan di PSBR Budi Satria tentang kebijakan kesehatan, kesehatan sangatlah terjaga, terus apabila ada memiliki suatu gejala langsung di intruksikan untuk periksa di Klinik dan langsung dilayani untuk berobat dan mendapatkan efek alhamdulilah pengurangan penyakit yang diderita*. “ ( transkrip 2 baris 13, informan 2)

 **Implementasi Kebijakan Kesehatan di Panti Sosial Bina Remaja Budi Satria Provinsi Kalimantan selatan**

Dalam metode Kebijakan Grindle, Implementasi adalah bagian Inti dari sebuah kebijakan setelah tujuan di tetapkan.

Implementasi yang Telah dilakukan di Panti sosial Bina Remaja Budi Satria yaitu :

* + - 1. Protokol Kesehatan terhadap Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial
				1. Sebelum masuk Panti Sosial bina Remaja Budi Satria provinsi Kalimantan Selatan diwajibkan menyertakan Surat vaksin dan hasil pemeriksaan Swab.

Informan Utama 1 menyatakan “*Kebijakan kami pertama, sebelum klien masuk di dalam PSBR mereka diwajibkan Swab PCR dan juga diwajibkan untuk Vaksin.*

*Kebijakan kami kedua, kami di PSBR menyiapkan alat-alat kebersihan.*

*Kebijakan kami ketiga, Penjadwalan Petugas Kesehatan untuk Optimalisasi kegiatan.*

*Kebijakan kami keempat, Menyiapkan Spanduk Prokes, supaya untuk tamu bisa membacanya dan menaati prokes yang ada di PSBR dan juga peralatan prokes yang harus mereka terapkan. “* (transkrip 4 , baris 33-42 ,informan utama 1 ).

* + - * 1. Sesudah masuk di dalam panti semua penerima manfaat program wajib melaksanakan prosedur protokol kesehatan

Adapun Protokol Kesehatan yang dilakukan adalah :

b.1 Protokol 3 M ( Mencuci tangan , Masker dan Menjaga jarak )

b.2 Pengawasan di ruang rehabilitasi sosial secara rutin oleh tim kesehatan dan petugas lainnya.

b.3 Pemberian Vitamin dan mineral secara rutin

b.4 Pengawasan rutin di wisma-wisma

b.5 Isolasi langsung jika ada laporan gejala ispa

b.6 Berjemur rutin di pagi hari di lapangan /Apel pagi.

b.7 Membatasi jarak orang di tempat ibadah/musalla panti

b.8 Membuat dua kelas umum terpisah agar mengurangi kepadatan .

b.9 Koordinasi dengan semua petugas panti dalam pengawasan semua kegiatan.

b.10 Minum air putih ditambah beberapa tetes minyak kayu putih

b.11 Senam dan olahraga bela diri

b.12 Motivasi dan promosi kesehatan mental

b.13 membentuk Tim Khusus

b.14 Rutin selalu berdo’a

Implementasi Protokol Kesehatan sangat ketat, para penerima manfaat program selain menggunakan masker juga menggunakan face shield sebagai pelindung wajah, bahkan saking ketatnya jika pada saat pengawasan ada laporan atau kedapatan langsung dalam kondisi pilek saja maka akan dilakukan isolasi tersendiri seperti kata informan 1*” Iya, Langsung kami Isolasi, supaya tidak menjangkit kepada klien-klien yang lain, oleh sebab itu kita, petugas kesehatan melaksanakan tugas untuk membawa anak itu keruang Isolasi.”* (transkrip 4 baris 53-55, informan utama 1). Hal senada juga di berikan informan utama 2 dalam bahasa lainnya menjelaskan kebijakan kesehatan pada masa pandemi covid 19 lebih banyak yang bersifat pengawasan sebagai bentuk optimalisasi kegiatan Petugas kesehatan yaitu : *“Kebijakan kesehatan yang dilakukan di PSBR yaitu : melakukan pemeriksaan awal, pengawasan dan pemantauan di wisma, Pengawasan dan pemantauan pelayanan di ruangan isolasi* “( transkrip 3 baris 7-10 , informan utama 2 )

2. Protokol Kesehatan Terhadap petugas Panti

Protokol kesehatan terhadap petugas panti hampir sama, namun untuk kegiatan Work From Home diperuntukkan bagi yang sakit, menderita penyakit tertentu yang merupakan co morbid. Dikarenakan keterbatasan petugas, untuk pembatasan jumlah petugas dilakukan penjadwalan kegiatan per shift.

3. Protokol Kesehatan untuk Tamu

Panti Membuat Portal khusus Untuk membatasi area keluar-masuk panti dan Untuk kunjungan tamu, seperti orang tua atau keluarga para penerima manfaat program pun hampir-hampir tidak mendapat izin bertemu, kecuali ada sesuatu yang darurat semisal ada keluarga penerima manfaat yang meninggal dunia. Adapun tamu yang terbatas adalah tamu- tamu yang ada urusan dengan bagian kantor panti saja itupun sangat terbatas dan tentunya dengan pengawasan tim. Hal tersebut tergambar dalam kalimat informan utama 1 yaitu:*” Portal yang didepan dekat pos keamanan, yang dijaga oleh security atau petugas keamanan itu disamping untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan juga sangat penting, dalam rangka menghindari orang masuk ke dalam Panti tanpa sepengetahuan petugas kesehatan, jadi itu sebagai jaring pertama, untuk penyaringan supaya kita itu tidak sembarang tamu dapat masuk ke dalam PSBR, termasuk orang tua (dari klien), kalau yang punya orang tua ingin berkunjung, dan kita tidak mewajibkan orang tua, tidak membolehkan orang tua untuk berkunjung ke-anaknya kecuali dengan video call.”*( transkrip 4 baris 87-96 informan utama 1)

**Manfaat Implementasi Kebijakan Kesehatan bagi Panti dan Penerima manfaat**

Dalam Implementasi kebijakan kesehatan yang diambil Panti dalam kondisi pandemi covid 19 dalam rangka tetap mempertahankan pola pelayanan langsung ditambah pelayanan protokol kesehatan yang ketat ternyata dapat dilaksanakan dengan baik dan mendapat respon positif dari penerima manfaat program, hal ini tergambar dalam jawaban informan kepada peneliti. Informan tambahan yaitu penerima manfaat program dalam transkrip 1, baris 29 menjawab bahwa *“ tidak mengganggu sama sekali”,* jawaban ini merupakan respon terhadap pertanyaan peneliti di saat menanyakan tentang kebijakan kesehatan yang diberikan dalam kegiatan rehabilitasi sosial yang berlangsung dengan protokol kesehatan ketat. Bahkan dalam baris 30 informan mengiyakan di saat peneliti menanyakan bahwa kebijakan kesehatan ini banyak sisi keuntungannya.

Walaupun begitu informan menyatakan bahwa penggunaan prokes sedikit longgar jika di wisma masing-masing.

Begitupula pada informan tambahan 2, *kebijakan prokes ketat bisa di ikuti olehnya tanpa kendala berarti* (transkrip 2, baris19) dan ia juga menambahkan bahwa kebijakan tersebut sangat bermanfaat,” *Sangat bermanfaat, yang pasti saya merasa lebih sehat, kesehatan saya terjaga.intinya sangat bermanfaat kebijakan kesehatan yang ada di PSBR bagi siswa siswi angkatan 81. Dan juga sangat bermanfaat untuk mengantisipasi terhindarnya kami dari penyakit, karena kami menjaga jarak”.*

**KESIMPULAN**

Dalam sebuah peristiwa yaitu isu pandemi covid 19 di saat aturan terhadap kegiatan publik dikurangi baik kualitas dan kuantitas kegiatan pelayanan dengan alasan keselamatan jiwa, ternyata Kepala Panti Sosial Bina Remaja Budi Satria provinsi Kalimantan Selatan menggunakan Kebijakan yang berbeda, Bukan berarti berbeda arus namun beliau menawarkan jalan lain agar kegiatan pelayanan terhadap anak terlantar putus sekolah tetap berjalan dengan semestinya, namun dengan persyaratan protokol kesehatan yang ketat.

Sebuah Kebijakan Dapat Berjalan dengan semestinya Jika:

1. Mempunyai pemimpin yang kuat dan berkarakter dan dapat menjadi role model.

2. Dukungan dari mayoritas anggota organisasi

3. Sinergi antara atasan dan pelaksana harus kuat.

**SARAN**

Dalam Kebijakan ini juga diperlukan jam kerja tambahan, kemampuan jiwa sosial yang lebih bahkan mungkin mengurangi jam keluarga, hal ini juga bisa menimbulkan efek psikologis bagi pekerja yang motivasinya bekerjanya adalah jam kerja dan materi.

Dalam Kebijakan ini, nampaknya ada pressure positif berupa motivasi-motivasi dari pimpinan agar kebijakan dapat berjalan, sehingga kebijakan dinamis seperti ini hanya cocok bagi staf yang mempunyai motivasi tinggi

Dalam pengambilan kebijakan kesehatan mestinya stake holder panti mempunyai basis keilmuan kesehatan atau minimal mempunyai staf analis kebijakan kesehatan. Terima kasih.

**DAFTAR PUSTAKA**

Agus, Moh. Tulus. (1992). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Ginting, R., & Purba, S. Y. (2019). Hubungan Kepemimpinan Dengan Kinerja Kader Imunisasi Dasar Campak Pada Bayi Di Wilayah Kerja Puskesmas Padang Bulan Tahun 2019. *Jurnal Kesehatan Masyarakat & Gizi.* 2(1). 63-70

Kemenkes RI. (2011). *Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Kemenkes.

Kemenkes RI. (2012). *Profil Kesehatan Masyarakat*. Jakarta : kemenkes

Kemenkes RI. (2017). *Profil Kesehatan Masyarakat*. Jakarta : kemenkes

Masnah ddk. (2020). Hubungan Antara Motivasi Dengan Kinerja Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kerja Puskesmas Lakessi Kota Parepare. *Jurnal manusia dan kesehatan.* 3(3). 421-431

Sutirin . 2006. Implementasi kebijakan pendataan rumah tangga miskin dan distribusi KKB oleh badan pusat statistik.

Siyoto, Sandu & Sodik,. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta:Literasi Media Publishing.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : ALFABETA.

Sutrisno, Edy. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (6th ed). Jakarta: Pranada Media Group.